

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SENTUL KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG

Nafi' Rachmah Fadhillah

12040674229 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) nafirachmahfadhillah@yahoo.co.id

Tauran, S.Sos.,M.Soc.,Sc

0013047602 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) tauran@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan membawa instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dokumentasi yaitu melalui dokumen resmi mengenai data monografi Desa Sentul, data absensi pelaksanaan musrenbang desa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat menentukan bagaimana masyarakat menyampaikan argumen dalam Musrenbang desa, Pada indikator pekerjaan, kepala desa dan stafnya menyadari bahwa masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan jadi untuk pelaksanaan musyawarah terkait dengan pembangunan desa lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dimana disatu sisi masyarakat bisa komitmen pada pekerjaannya, dan di sisi lain bisa memikirkan desanya untuk maju dan untuk membangun. Pada indikator terakhir dari faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang desa adalah pengalaman berkelompok. Dengan banyaknya pengalaman berkelompok yang masyarakat miliki, tidak lantas membuat mereka berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada faktor eksternal yaitu faktor kepemimpinan, hasil penelitian menunjukkan masyarakat menilai kepala desa kurang memberikan motivasi kepada masyarakat pada umumnya, karena sosialisasinya yang terbatas kepada masyarakat kalangan menengah bawah namun pemerintah desa baik dari kepala desa, BPD, dan LPMD telah melaksanakan tanggung jawab yang baik dalam mengambil setiap keputusan pada pelaksanaan Musrenbang desa.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Musrenbang.

Abstract

The purpose of this research to describe the factors that influence public participation in development planning in Village Sentul Sub District Tembelang Jombang. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques used were interviews and documentation. Interviews were conducted in person by bringing the research instrument in the form of written questions. Documentation is through the official documents regarding the Sentul village monograph data, attendance data musrenbang village. The data used in this study amounted to 8 informants. The results showed that the level of public education determines how people convey arguments in Musrenbang village, the master village and his staff realize that people prefer the job finished for the implementation of the deliberations related to rural development more attuned to the conditions of the existing society in which one side of society can commitment to his work, and on the other hand can be thought of his village to go forward and to build. In the last indicator of internal factors that influence public participation in the implementation of Musrenbang village is a group experience. With so many people experience in groups that have, does not necessarily make them participate in rural development planning. On external factors, namely factor of leadership, research show public assesses the village master village failed to give motivation to the community in general, because socialization is limited to people in the lower middle but village officials both from the master village, BPD, and LPMD has been carrying out responsibilities in both the take any decision on the implementation of Musrenbang village.

Keywords: Participation, Community, Musrenbang.

PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia telah melahirkan berbagai kebijakan mengenai pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta bagaimana pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya menurut asas otonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengusung semangat demokratisasi pemerintahan daerah serta menjadikan desentralisasi sebagai instrumen penyelenggaraan

pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggambarkan perubahan perencanaan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan diperkirakan telah mencapai 46 persen. Jika saat ini penduduk Indonesia sudah lebih dari 240 juta, artinya paling sedikit ada 110,4 juta orang tinggal di pedesaan. <http://www.kompas.com>, diakses 17 September 2015. Sumber dari pembangunan nasional adalah dari pembangunan masyarakat desa. Perubahan dari sentralisasi menuju desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan peran serta maupun partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Adisasmita (2006:3) berpendapat bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yang mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disebut dengan Musrenbang yang melibatkan semua unsur masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang merupakan proses musyawarah tentang pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara masyarakat di setiap daerah yang akan dilaksanakan pembangunan. Dalam Musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka mengenai proses pembangunan yang akan dilaksanakan tentang bagaimana yang seharusnya pemerintah lakukan dan apa yang seharusnya masyarakat lakukan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan dapat menjadi sarana pemberdayaan warga karena warga diberi kesempatan untuk mengemukakan usulannya dan mendapat kesempatan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat dalam jangka panjang adalah peningkatan keterampilan politik warga karena

sudah terbiasa bernegosiasi, melakukan kompromi, dan sekaligus menyepakati berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik. Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah. Rahardjo (2006:37) menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan karena anggota masyarakat dianggap mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat dan mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, serta mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan alasan pertimbangan diatas, maka diharapkan rencana pembangunan masyarakat setempat akan dapat disusun dengan sebaik-baiknya

Meskipun masyarakat berhak untuk berpartisipasi, adakalanya peran sentral pelaksanaan pembangunan desa masih dipegang sepenuhnya oleh pemerintah desa, sedangkan masyarakat lebih bersikap acuh tak acuh terhadap proses perencanaan pembangunan (Purnamasari, 2006). Padahal jika dalam proses perencanaan pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat maka program pembangunan desa akan berpotensi mengalami kendala. Hardjosoekarto (2014:39) menyatakan bahwa keberadaan Musrenbang sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang partisipatif seharusnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholders, khususnya masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan terbesar dari keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam praktiknya, perencanaan dan program pembangunan masih merupakan dominasi pemerintah dan hanya mengakomodasi dan memberi ruang gerak yang terbatas pada aspirasi publik. Pada akhirnya, Musrenbang tidak lagi menjadi daya tarik khususnya bagi

kelompok masyarakat sebagai silent majority, yang aspirasinya seringkali terpinggirkan oleh kekuatan dominan pemangku kepentingan. Efektifitas Musrenbang hanya bisa bekerja dan menjadi pendorong partisipasi masyarakat yang berkualitas, jika didukung oleh adanya regulasi yang adil dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat secara universal, serta rasionalitas dan ketersediaan anggaran.

Namun partisipasi bukanlah sesuatu yang dapat datang dengan sendirinya. Nasution (2009:22) menyatakan bahwa seseorang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan jika memiliki pendidikan yang baik karena pengetahuan, sikap, dan keterampilan erat hubungannya dengan pendidikan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes bukanlah hal yang mudah. Beberapa kasus terkait dengan sulitnya mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dapat ditunjukkan pada kasus di Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2006), di Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, peran pemerintah dalam Musrenbang kelurahan adalah fungsinya sebagai regulator dan sosialisasi serta pendampingan, namun sosialisasi yang dilaksanakan kurang berhasil, para perencana pemerintah pun masih mencari konsep yang tepat dalam perencanaan. Peran tokoh masyarakat atau pemuka agama, karang taruna serta organisasi sosial lainnya belum sepenuhnya diberdayakan, sementara perempuan dapat berperan dalam musrenbang kelurahan ini, hanya melalui kegiatan PKK. Demikian juga dalam kajian yang dilakukan oleh Fadil (2013). Dalam penelitiannya, Fadil mengemukakan bahwa masyarakat terlibat dalam proses penyusunan atau perumusan kegiatan perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah, namun tidak ada sarana dalam melakukan kontrol dan pengawasan bagi masyarakat dalam Musrenbangkel.

Tidak berbeda jauh dengan kasus diatas, persoalan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes juga terjadi di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Sentul rendah, hal tersebut terlihat dari dokumentasi daftar hadir Musrenbang Desa tahun 2015, menurut wawancara dengan Kepala Desa Sentul menyatakan bahwa masyarakat yang tidak merasa berkepentingan enggan hadir dalam Musrenbang Desa. Hal tersebut dapat diketahui dari dokumentasi daftar hadir musrenbang Desa Sentul pada tahun 2015 ini. Pada unsur masyarakat hanya terdapat perwakilan 5 orang dari setiap RW, sedangkan di Desa Sentul sendiri terdapat 9 Rukun Warga (RW).

Pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembangunan. Pola pikir pada masyarakat umum, semakin sibuk seseorang semakin tidak mempunyai waktu berpartisipasi dalam pembangunan (Nasution, 2009:33). Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sentul sebagai buruh tani yaitu sebanyak 832 jiwa. Sedangkan penduduk lainnya berprofesi sebagai petani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, TNI, peternak, dan lain-lain. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilihat dari segi pekerjaan, tidak lantas membuat mereka berpartisipasi secara aktif dalam rencana pembangunan Desa Sentul.

Salah satu faktor eksternal yang menentukan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan adalah kepemimpinan yang merupakan faktor penentu keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan suatu daerah, karena pemimpin berfungsi sebagai pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh suatu desa menuju tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan dokumentasi notulen, rapat pramusrenbang yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014 di Balai Desa Sentul dan dihadiri oleh Dinas Pengairan Kecamatan Kesamben dan Dinas Pertanian Kecamatan Tembelang, dari 51 masyarakat yang hadir dalam rapat, hanya ada 2 orang dari perwakilan masyarakat yang berani menyampaikan ide dalam pengambilan keputusan. Selebihnya, usulan disampaikan oleh Kepala Desa, pihak Pertanian Kecamatan Tembelang, Ketua BPD dan Ketua TPK PNPM 2014. Hal tersebut menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide pada perencanaan pembangunan di daerahnya.

Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang"

A. Rumusan Masalah

Selaras dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang sesuai yakni "Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?"

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis bagi Ilmu Administrasi Negara

khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Manfaat Praktis

Bagi Aparat Desa Sentul

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis dalam memberikan masukan bagi aparat Desa Sentul untuk meningkatkan dan perbaikan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Bagi Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman, tambahan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang praktik partisipasi masyarakat di desa pada era otonomi daerah khususnya studi musrenbang.

Bagi Universitas Negeri Surabaya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan dalam proses evaluasi yang terjadi.

Menurut Sutrisno dalam Nasution (2009) disebutkan ada dua pengertian partisipasi yakni:

“Pertama, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuan ditentukan perencana; Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.”

Selanjutnya, definisi partisipasi diperkuat menurut World Bank (dalam Sumarto, 2009) yang menjelaskan bahwa partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelaku (stakeholders) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka.

Jadi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah hak dan tindakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan,

kepentingan, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, dan akses untuk masuk dan terlibat aktif menentukan dan memengaruhi kebijakan serta melakukan kontrol terhadap proses politik yang terkait dengan pemerintah.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan

1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang berhubungan dengan partisipasi menurut Gibson (2000) dalam Nasution (2009) adalah sebagai berikut: (1) faktor kependudukan, antara lain: (a) usia, (b) jumlah keluarga, dan (c) daerah asal atau tempat kelahiran; (2) faktor sosial ekonomi, antara lain: (a) tingkat pendidikan, (b) pekerjaan, (c) pengalaman berkelompok, (d) status; (3) faktor budaya merupakan keterikatan terhadap norma budaya yang berlaku di masyarakat, juga penyebab ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk lebih jelasnya, definisi sub variabel adalah sebagai berikut.

- a. Usia adalah lamanya hidup responden yang dihitung sejak kelahirannya sampai saat dilakukan penelitian yang dinyatakan dengan satuan tahun. Sub variable ini dapat digunakan untuk menganalisis usia tua, menengah, dan muda dalam melakukan solidaritas sosial dan partisipasi pembangunan.
- b. Asal daerah adalah tempat tinggal asal responden sebelum menetap di tempat tinggal sekarang.
- c. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditempuh melalui pendidikan formal. Lamanya responden menyelesaikan pendidikan terakhir berdasarkan satuan tahun. Sub variable ini digunakan untuk menganalisis jenjang pendidikan mulai dari tidak tamat sekolah dasar sampai dengan program magister (S2).
- d. Jenis pekerjaan adalah kegiatan matapecaharian responden yang dapat menghasilkan pendapatan, yang dipergunakan sebagai tolak ukur kesibukan dalam bekerja penuh maupun bekerja tidak penuh.

Silaen (1998) dalam Wicaksono menyatakan bahwa semakin tua umur seseorang maka penerimaannya terhadap hal-hal baru semakin rendah. Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi, semakin tua usia seseorang, relatif semakin berkurang juga kemampuan fisiknya dalam mempengaruhi partisipasi sosialnya, dan sebaliknya semakin muda umur seseorang, semakin tinggi tingkat partisipasinya dalam suatu kegiatan atau program tertentu. Ajiswarman (1996) dalam Wicaksono (2010) menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap sesuatu hal yang baru. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin mudah ia menerima hal-hal baru yang ada di lingkungan sekitarnya.

Ajiswarman (1996) dalam Febriana (2008) menyatakan bahwa semakin besar jumlah beban keluarga menyebabkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan akan berkurang karena sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi jumlah beban keluarga juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Slamet (1994), faktor-faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Jadi ciri-ciri individu akan sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi seseorang dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan menurut Plumer (1995) dalam Suryawan (2004), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin dan kepercayaan terhadap budaya tertentu.

2. Faktor Eksternal

Pangestu (1995) dalam Febriana (2008) memaparkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran. Hal tersebut terjadi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi. Di sisi lain, Tjokroamidjojo (1996) mengungkapkan faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam partisipasi masyarakat adalah:

- a. Faktor kepemimpinan dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pimpinan dan kualitas. Indikator variabel kepemimpinan ialah: (1) memberikan motivasi kepada masyarakat, yaitu untuk mendapatkan hasil yang baik secara optimal, (2) tanggung jawab sebagai seorang pemimpin terhadap setiap keputusan yang diambil, (3) keaktifan pemimpin dalam mendorong berpartisipasi dan memberi perhatian timbal balik dengan masyarakat, (4) komunikasi, yaitu terdiri dari memberikan informasi, stabilisator, dan fasilitator.
- b. Faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna suatu program (Sunarti, 2003).

C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antarindividu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman, baik keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, LPMD, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak dapat berjalan maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah,

masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi, karena itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:40). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berikut:

A. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian melalui observasi maupun wawancara sebagai sumber data utama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang melalui informan yang dianggap mampu membantu menjawab rumusan masalah penelitian.

Maka dari itu, narasumber atau informan dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yaitu Bapak Ir. Sugiyono.
2. Masyarakat yang hadir dalam Musrenbang Desa Sentul yaitu Ibu Dra. Utami.
3. Masyarakat yang tidak hadir dalam undangan Musrenbang Desa Sentul sebanyak 4 orang yaitu Ibu Dwi Esti, Bapak Sunarno, Bapak Suyono, S. Pd., dan Bapak Ali Imron.
4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu Ir. Sumardi.
5. Ketua Badan Perwakilan Desa yaitu Suparyono, S.Pd.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau data yang diperoleh dari obyek penelitian yaitu berupa dokumentasi dari Kantor Kepala Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data sekunder berupa dokumen dari Kantor Kepala Desa terkait pelaksanaan musrenbang Desa Sentul sangat berguna untuk mendukung sumber data primer.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dianggap memiliki kompetensi terkait kajian yang akan diteliti. Dalam hal ini, subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013:54), purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Bentuk dari pertimbangan ini misalkan, memilih informan dengan pengetahuan yang memadai sesuai

dengan hal yang akan diteliti, atau informan sebagai orang yang memiliki jabatan tertentu, sehingga membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang terjadi.

D. Teknik Pengumpulan Data

(1) Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013:73-74) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

(2) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen tertulis misalnya saja dokumen resmi mengenai data monografi Desa Sentul, data absensi pelaksanaan musrenbang desa, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti yang dalam hal ini berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kondisi Desa Sentul

1. Luas Desa Sentul Kecamatan Tembelang Desa Sentul Kecamatan Tembelang secara geografis mempunyai luas 261,69 Ha. Desa Sentul merupakan desa yang memiliki penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani hampir 70% dari jumlah penduduk. Desa Sentul merupakan Desa yang terletak ± 3 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tembelang.

2. Organisasi Pemerintahan Desa Sentul Desa Sentul terdiri dari Dua (2) Dusun, yaitu Dusun Sentul Barat dan Sentul Timur, Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Sentul terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 1 Staf Keuangan, 1 Staf Pembangunan, 1 Staf Kesra, 1 Staf Umum, dan 2 Kepala Dusun. Desa Sentul terdiri dari 9 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tangga (RT).

3. Visi dan Misi Desa Sentul

a. Visi

Mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, indah, aman, sentosa, tertib, rukun dan lestari

b. Misi

- 1) Membangun masyarakat yang agamis dan agraris.
- 2) Mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

- 3) Membangun infrastruktur pedesaan untuk industrialisasi pertanian.
- 4) Mengembangkan dan membangun sistem pendidikan yang berbasis kompetensi.
- 5) Menata pemerintahan Desa Sentul yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- 7) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- 8) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- 9) Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
- 10) Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup.
- 11) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

B. Pembahasan

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada indikator faktor-faktor internal yang berhubungan dengan partisipasi menurut Gibson dalam Nasution (2009) adalah:

1. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan pengalaman berkelompok menjadi penentu aktif tidaknya seseorang untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desanya, khususnya untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa.

a. Tingkat Pendidikan

Seseorang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan jika memiliki pendidikan yang baik karena pengetahuan, sikap, dan keterampilan erat hubungannya dengan pendidikan. Berdasarkan dari teori yang disampaikan oleh Gibson dalam Nasution (2009), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, bahwa dengan pendidikan masyarakat yang tinggi sangat menentukan bagaimana masyarakat menyampaikan argumen dalam Musrenbang desa, masyarakat selalu mempertahankan usulannya, misalnya untuk perbaikan sarana jalan dan irigasi yang masuk dalam skala prioritas pembangunan desa, usulan tersebut sangat penting sekali untuk dipertahankan dalam Musrenbang kecamatan.

Bahkan ketika menjadi delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desa pada forum Musrenbang kecamatan berkompetisi dengan desa-desa lain. Tingkat pendidikan masyarakat menentukan karena yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan luas jadi ketika beradu argumen dengan desa, masyarakat tersebut lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasannya. Masyarakat yang tidak menghadiri undangan Musrenbang, rata-rata tingkat pendidikan terakhirnya pada sekolah menengah pertama sedangkan dari data penduduk Desa Sentul menurut tingkat pendidikan berdasarkan RPJM Desa Sentul tahun 2014-2018, persentase tertinggi yaitu 46% adalah masyarakat yang belum sekolah, tidak sekolah, atau sudah tidak sekolah.

b. Pekerjaan

Pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembangunan. Pola pikir pada masyarakat umum, semakin sibuk seseorang semakin tidak mempunyai waktu berpartisipasi dalam pembangunan (Nasution, 2009:33). Berdasarkan data pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sentul Tahun 2014-2018, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sentul sebagai buruh tani yaitu sebanyak 3.212 jiwa dari total keseluruhan 4.636 jiwa, kurang lebih 70% dari jumlah keseluruhan penduduk.

Kepala desa dan stafnya menyadari bahwa masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan jadi untuk pelaksanaan musyawarah terkait dengan pembangunan desa lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dimana disatu sisi masyarakat bisa komitmen pada pekerjaannya, dan di sisi lain bisa memikirkan desanya untuk maju dan untuk membangun. Masyarakat yang tidak menghadiri undangan dalam Musrenbang desa yaitu Bapak Narno berusia 51 tahun dan Bapak Ali Imron berusia 55 tahun bermata pencaharian sebagai petani. Bapak Suyono berusia 53 tahun berprofesi sebagai PNS khususnya pendidik atau guru, dan Ibu Dwi Esti berusia 50 tahun merupakan seorang pedagang. Mereka memutuskan untuk tidak hadir dalam Musrenbang terkait dengan waktu luangnya lebih dipergunakan untuk beristirahat setelah seharian berkuat dengan pekerjaannya. Selain itu, usia juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi, semakin tua usia seseorang, relatif semakin berkurang juga kemampuan fisiknya dalam mempengaruhi partisip

c. Pengalaman Berkelompok

Dengan pengalaman berkelompok yang dimiliki, membuat seseorang cenderung lebih berani dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam suatu forum karena pada saat berorganisasi mereka terlatih untuk berpikir kritis dan tanggap dalam memecahkan masalah, serta mempunyai inisiatif dalam menyikapi perubahan di

lingkungannya. Berdasarkan dari teori yang disampaikan oleh Gibson dalam Nasution (2009), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, bahwa dengan banyaknya pengalaman berkelompok yang masyarakat miliki, tidak lantas membuat mereka berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, seperti Bapak Suyono yang dulu pernah menjadi ketua karang taruna Desa Sentul, kemudian sekretaris LPMD, dan sekarang menjadi anggota BPD. Dan juga Ibu Dwi Esti yang pada saat itu juga memutuskan untuk tidak hadir dalam Musrenbangdes, pengalaman organisasinya adalah PERSIT, PERSIT merupakan organisasi Persatuan Istri Tentara, dan pada saat ini menjabat sebagai sekretaris PKK di Desa Sentul.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada indikator faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Tjokroamidjojo (1996) adalah:

1. Faktor Kepemimpinan

a. Memberikan Motivasi kepada Masyarakat.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan rencana pembangunan suatu desa karena pemimpin berfungsi sebagai pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh desa menuju tujuan pembangunan yang akan dicapai dan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan Tjokroamidjojo (1996), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, dalam hal pemberian motivasi kepada masyarakat, Kepala Desa memberikan motivasi kepada masyarakat melalui pamflet, dan sosialisasi per RT/RW dengan harapan agar masyarakat berfikir dan mempunyai kreatifitas bahwa desa bukan hanya milik kepala desa dan perangkatnya namun juga milik masyarakat semua sehingga masyarakat ikut tergugah untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Peran pemerintah dalam musrenbang desa adalah fungsinya sebagai regulator dan sosialisasi serta pendampingan, namun sosialisasi yang dilaksanakan kurang berhasil. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Dwi Esti selaku sekretaris PKK Desa Sentul yang menuturkan bahwa kepala desa kurang memberikan motivasi kepada masyarakat pada umumnya, karena sosialisasinya juga kurang kepada masyarakat kalangan menengah bawah.

b. Tanggung Jawab Sebagai Seorang Pemimpin terhadap Setiap Keputusan yang Diambil.

Tanggung jawab pemerintah desa dalam setiap pengambilan keputusan sangat krusial dalam kemajuan pembangunan desa dan untuk mengetahui baik buruknya

keputusan yang diambil tidak bisa dinilai hanya dari konsekuensi yang ditimbulkan, namun juga melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan Tjokroamidjojo (1996), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Desa Sentul dalam merencanakan pembangunan desa adalah dengan mengambil keputusan atas dasar musyawarah mufakat mulai dari tingkat RT/RW, lalu diangkat dalam Musrenbang desa dan kecamatan. Pada saat Musrenbang desa menentukan skala prioritas pembangunan dari rencana pembangunan jangka menengah desa bersama masyarakat, LPMD, dan BPD. Jadi pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif adalah mutlak untuk kepala desa, dimana masyarakat dan lembaga desa juga turut serta didalamnya.

Bentuk tanggung jawab lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sentul dalam Musrenbang adalah dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua usulan pembangunan melibatkan elemen masyarakat dari bawah yaitu dari RT/RW lalu dirangkum menjadi usulan di musyawarah dusun dan selanjutnya dibawa ke tingkat desa. Jadi memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa perencanaan pembangunan desa dibuat atas dasar aspirasi dari masyarakat.

Tanggung jawab badan permusyawaratan desa selaku lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan Musrenbang termasuk dalam bidang pengawasan, pelaksanaan, dan kepanitiaan. Ketika pemerintah desa membutuhkan tenaga dan pikiran untuk kelancaran pembangunan, pihak BPD siap melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan.

c. Keaktifan Pemimpin dalam Mendorong Berpartisipasi dan Memberi Perhatian Timbal Balik dengan Masyarakat.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan Tjokroamidjojo (1996), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, keaktifan pemimpin dalam mendorong berpartisipasi dalam arti Kepala Desa Sentul menyadarkan dan mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam Musrenbang desa, jadi bukan semata-mata menyuruh atau bahkan memaksa namun lebih kepada menyentuh nurani. Kepala Desa Sentul menyadarkan masyarakat akan pentingnya pembangunan partisipatif mulai dibentuk dari lembaga BPD dan LPMD. Bukan hanya masyarakat yang potensi saja yang memberikan masukan mengenai pembangunan

desa, masyarakat yang sedia kalanya pasifpun bisa memberikan usulannya sehingga nanti diangkat oleh BPD dan LPMD menjadi usulan desa.

Yang dimaksud dengan memberi perhatian timbal balik adalah mengemukakan keinginan atau harapan agar masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dari BPD, wujud perhatian timbal balik kepada masyarakat adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat pada saat musyawarah dari tingkat RT/RW bahwa pembangunan itu tidak serta merta turun begitu saja, harus dengan musyawarah perencanaan, harus ada suatu proposal, atau suatu musrenbang sehingga prioritas pembangunan mana yang lebih diprioritaskan itu maka akan terealisasi.

d. Komunikasi, yaitu Terdiri Dari Memberikan Informasi, Stabilisator, dan Fasilitator.

Komunikasi merupakan salah satu sarana dalam memberikan aktivasi dari pemerintah desa terhadap masyarakat. seperti memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat. Berdasarkan dari teori yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo (1996), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, salah satu masyarakat yang memutuskan tidak hadir dalam pelaksanaan Musrenbang desa menuturkan bahwa informasi terkait pelaksanaan Musrenbangdes belum disampaikan secara optimal kepada masyarakat. Kepala desa seharusnya melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat, bukan masyarakat tertentu saja.

Yang kedua adalah stabilisator yang merupakan unsur penengah yang menjebatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam menangani konflik. Bentuk stabilitas antara masyarakat dengan pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk negosiasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Setiap perwakilan RW yang hadir menyampaikan usulan terkait dengan kepentingan pembangunan di RW nya, lalu dibentuklah skala prioritas, mana yang harus didahulukan, kemudian dimusyawahkan serta dinegosiasikan. Usulan yang dinegosiasikan bukan usulan fanatik di RW, melainkan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, jadi tidak akan timbul kecemburuan sosial karena sejak awal penentuan proyek pembangunan sudah dilakukan negosiasi dengan masyarakat.

Dan yang ketiga adalah fasilitator, dimana tugas pemimpin fasilitator hanya memperlancar dan mempermudah perkembangan tersebut. Kepala desa, perangkat desa beserta BPD dalam memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa Sentul yaitu dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kemudian memberikan suatu pengertian bahwa kepala desa, perangkat desa beserta BPD itu sangat menentukan dalam pembangunan yang ada di desa karena segala sesuatu

yang ada di desa itu tidak lepas dari persetujuan dari BPD, jadi terdapat kesinambungannya antara BPD dengan pemerintah desa sehingga pemerintahan desa sendiri itu antara BPD, kepala desa dan perangkatnya.

2. Faktor Komunikasi, Gagasan-Gagasan, Ide, Kebijakan, dan Rencana Rencana Baru.

Faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijakan, dan rencana-rencana baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat (Tjokroamidjojo, 1996). Komunikasi antara pemerintah Desa Sentul dengan masyarakat termasuk dalam komunikasi dua arah. Jika ada tambahan dana dari tingkat I dan permintaan mendadak yang diharuskan masuk di dalam RPJMDes, pada akhirnya tetap usulan dari bawah yang akan didahulukan.

Dalam menyampaikan gagasan dan ide, masyarakat selalu menekankan pada kepentingan RW nya masing-masing, sedangkan usulan-usulan tersebut harus disesuaikan dengan anggaran. Jadi pihak pemerintah desa lebih mengutamakan usulan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat dengan melihat pada anggaran. Untuk usulan lainnya tetap masuk pada agenda, jika belum masuk di RPJMDes, maka menunggu giliran untuk masuk ke RPJMDes lima tahun yang akan datang.

Masyarakat Desa Sentul belum secara mendetail dalam melakukan evaluasi terkait dengan usulan yang sudah terealisasi. Evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat hanya berupa kontrol bahwa usulannya kemarin sudah terealisasi, kalau kontrol secara langsung sudah ditangani oleh tim pembangunan desa.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat menentukan bagaimana masyarakat menyampaikan argumen dalam Musrenbang desa karena yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan luas jadi ketika dipercaya menjadi tim delegasi desa pada Musrenbang kecamatan memaparkan tentang rencana pembangunan desa beradu argumen dengan desa lain, masyarakat tersebut lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasannya. Pada indikator pekerjaan, kepala desa dan stafnya menyadari bahwa masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan jadi untuk pelaksanaan musyawarah terkait dengan pembangunan desa lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dimana disatu sisi masyarakat bisa komitmen pada pekerjaannya, dan di sisi lain bisa memikirkan desanya

untuk maju dan untuk membangun. Pada indikator terakhir dari faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang desa adalah pengalaman berkelompok. Dengan banyaknya pengalaman berkelompok yang masyarakat miliki, tidak lantas membuat mereka berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Selanjutnya adalah kepemimpinan yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa. Masyarakat menilai kepala desa kurang memberikan motivasi kepada masyarakat pada umumnya, karena sosialisasinya juga kurang kepada masyarakat kalangan menengah bawah namun pemerintah desa baik dari kepala desa, BPD, dan LPMD telah melaksanakan tanggung jawab yang baik dalam mengambil setiap keputusan pada pelaksanaan Musrenbang desa. Kepala desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbang melalui lembaga LPMD dan BPD. Mengenai wujud perhatian timbal balik yang diberikan oleh perangkat desa adalah dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat pada saat musyawarah pada tingkat RT/RW mengenai pentingnya kontribusi masyarakat terhadap suksesnya pembangunan desa. Informasi mengenai pelaksanaan Musrenbangdes belum disampaikan secara optimal kepada masyarakat, namun pemerintah desa telah mengemban tugasnya dengan baik sebagai stabilisator dan fasilitator dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sentul.

Pada indikator terakhir faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa adalah faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan sudah termasuk dalam komunikasi dua arah namun dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan, masyarakat hanya berkisar bahwa usulannya sudah dikerjakan, dan tidak ada evaluasi lebih jauh lagi dari masyarakat. Dari pihak pemerintah Desa Sentul memfilter usulan-usulan yang diprioritaskan yaitu berdasarkan kebutuhan dari masyarakat bukan pada keinginan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yaitu:

1. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menghadiri Musrenbang, pemerintah Desa Sentul mengundang melalui undangan tertulis kepada seluruh anggota BPD, LPMD maupun perwakilan

karang taruna, hal itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadiri rapat-rapat, sehingga jalannya rapat dapat berjalan baik dengan adanya peserta rapat yang telah ditentukan. Serta dalam menggali usulan pemerintah Desa harus lebih respek kepada kaum perempuan atau minoritas tanpa membedakan pekerjaan dan tingkat pendidikan masyarakat.

2. Untuk masyarakat Desa Sentul sebaiknya menyadari pentingnya Musrenbang, karena Musrenbang bukan hanya kepentingan pemerintah desa saja, namun kehadiran dari semua unsur masyarakat akan menambah kemajuan segala sektor Desa Sentul sendiri.
3. Dalam proses sosialisasi kepada masyarakat desa, aparatur desa harus dapat menyampaikan informasi tentang keadaan desa, penyampaian itu harus dapat dipahami oleh masyarakat Desa sentul, dengan cara penyampaian yang jelas dan nyata agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwipayana, Ari, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. 2014. *Pengkajian Positioning Fungsi Pengawasan DPD RI dalam Musrenbang*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2014.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mardikunto & Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press. Rodliyah. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:CV. ALFABETA
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA
- Sumarto, HetifahSj. 2009. *Inovasi, Partisipasi , dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rujukan Internet

<http://www.kompas.com/>, diakses tanggal 17 September 2015

Rujukan Jurnal

Fadil, Fathurrahman. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, (Online), Volume II, Edisi 2, (<http://download.portalgaruda.org/article>, diakses tanggal 15 September 2015)

Purnamasari, Dewi. 2006. Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan: Studi Kasus Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Pada Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, (Online), (<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-109809.pdf>, diakses tanggal 15 September 2015)

Putri, Anggita Permana. 2009. Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Deskriptif Kualitatif Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Laweyan Kota Surakarta),(Online),(<http://eprints.uns.ac.id/8899/1/70640207200907451.pdf>, diakses tanggal 15 September 2015).